

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI PROGRAM PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Syahzaki Alrahman

NPP. 29.0330

Asdaf Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: syahzakialrahman@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): *Since the Covid-19 Pandemic, the number of poor people has slipped so that it cannot be known how significant handling. The social welfare problem program is one of the poor empowerment programs in the Social and Community Empowerment Office of Batam City, Riau Islands Province. With this program, poor people can be empowered properly in order to prosper themselves. Purpose:* *The purpose of this study is to find out how the Batam City Government's efforts through the Social Service and Community Empowerment in empowering and providing guidance to the poor in order to prosper their own lives, especially during the Covid-19 pandemic. Method:* *This research uses a descriptive qualitative research method approach. Result :* *The results Community empowerment has been successful through the PMKS program, it's just that there is still a lack of direct socialization from the government to the community, and community enthusiasm is still lacking.*

Keyword : *Community Empowerment, Poor Fakir, Covid-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Semenjak Pandemi Covid-19, angka fakir miskin melonjak sehingga tidak dapat diketahui bagaimana penanganan yang signifikan. Program penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu program pemberdayaan fakir miskin yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya program ini masyarakat fakir miskin dapat diberdayakan dengan baik agar dapat mensejahterakan dirinya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam memberdayakan dan memberi pembinaan kepada masyarakat fakir miskin agar dapat mensejahterakan hidupnya sendiri terutama pada pandemi covid-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif. **Hasil :** Pemberdayaan masyarakat sudah berhasil melalui program PMKS, hanya saja masih kurang sosialisasi langsung dari Pemerintah kepada masyarakat, dan antusias masyarakat yang masih kurang.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Fakir Miskin, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Batam sendiri ialah salah dari banyak kota yang terletak bersebelahan dengan negara maju yang dimana pertumbuhan ekonomi yang melebihi dari rata-rata pertumbuhan dari perekonomiannya secara nasional. Kota Batam yang mempunyai visi sebagai "*Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat*". Hal ini lah yang menjadikan Kota Batam untuk menjadi kota yang sejahtera yang dimana berarti keadaan yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi keadaan yang lebih baik pada tingkatan kesehatan, pendapatan penduduk, Pendidikan dalam suatu wilayah. Yang nantinya dapat memberi peluang besar pada kesejahteraan tingkat tinggi dari generasi satu ke generasi yang lain. Adapun visi dari dinas sosial dan pemberdayaan kota batam memiliki suatu visi yaitu "*Terwujudnya Pelayanan sosial yang prima dalam pembangunan kesejahteraan sosial*".

Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Batam merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Batam yang mempunyai peran strategis untuk menangani para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti fakir miskin, gelandangan, pengemis, anak punk, waria, wanita tuna susila (WTS), penjual koran dan anak jalanan yang merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan di wilayah perkotaan. Menurut Wirosardjono (1997:30) "secara konseptual gelandangan bagian dari lapisan sosial, ekonomi dan budaya pada tingkatan masyarakat kota (Bahri, 2015). permasalahan umum dari kelompok tuna sosial sangat erat dan tentunya berkaitan dengan terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah perkotaan (Bahri, 2015).

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dimana kegiatan dinas sosial

juga memiliki peran yakni melakukan pengurangan permasalahan sosial yang dimana nantinya bisa menaikkan pemenuhan kebutuhan dasar dari PMKS. Peran dinas sosial dan pemberdayaan menjadi sangat penting dikarenakan untuk mengurangi penyandang masalah maupun pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosialnya serta meningkatkan kemampuan dari usaha kebutuhan dari pemenuhan hidup untuk setiap keluarganya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Latar belakang permasalahan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama terdapatnya peningkatan angka kemiskinan di kota batam dalam 2 tahun terakhir, yang kedua terdapat program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota batam sejak 2016, salah satu fokus PMKS adalah penanganan fakir miskin oleh karena itu saya menetapkan judul pemberdayaan fakir miskin melalui program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada masa pandemi covid-19 di dinas sosial dan pemberdayaan di kota batam.

Dari ketiga identifikasi masalah itu saya memilih rumusan masalah yang pertama Bagaimana Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam, yg kedua Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam, yang ketiga Bagaimana Strategi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemberdayaan fakir miskin telah dilakukan oleh 3 peneliti yang dimana penelitian yang dilakukan andry apriadi dkk yaitu STRATEGI DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN BOGOR, penelitian yang dilakukan oleh romi saputra berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan", dan penelitian yang dilakukan nur handayani dkk berjudul "PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT" yang dimana dari 3 penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan dari penelitian yang saya lakukan sebab penelitian saya melihat pemberdayaan fakir miskin melalui program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan program pemerintah sementara ketiga penelitian ini berangkat dari program yang dibangun oleh masyarakat oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Hasil penelitian Andri Apriyadi, Yusman Syaikat, dan Fredian Tonny Nasdian (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Apriyadi, Yusman Syaikat, dan Fredian Tonny Nasdian (2013), berjudul "STRATEGI DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN BOGOR" penelitian ini melalui pengumpulan data, Data yang dikumpulkan lewat observasi dan kuisisioner kemudian dianalisis lagi

dengan analisis deskripsi, analisis isi, dan AHP (Analytic Hierarchy Process).

Kesimpulan penelitian yang dilakukan dijelaskan penelitian yang dilakukan mendapatkan suatu hasil penelitian ditunjukkan bahwa alternatif seperti meningkatnya intensitas pendampingan, fasilitas Pendidikan non formal/pelatihan keterampilan, serta pembedaan dalam penerima program meruakan langkah strategis yang diprioritaskan yaitu dengan bobot masing-masing 0,106, 9,091, dan 0,076 (Apriyadi, Syaikat, & Nasdian, 2013). Yang dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan pada aspek lokasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, teori utama yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan juga hasil penelitian.

2. Hasil penelitian yang dilakukan Romi Saputra (2018)

Penelitian yang dilakukan Romi Saputra (2018), berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan" penelitian yang dilakukan Romi Saputra memakai metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lewat program Kelompok Usaha Bersama.

Berdasarkan Kesimpulan penelitian yang dijelaskan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil penelitian yang dimana Efektivitas dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung gading. Hasilnya sudah tergolong efektif karena di lihat dari tercapainya tujuan program, meningkatnya penghasilan masyarakat, serta terselesaikannya masalah untuk meningkatkan fungsi sosial anggota. Sayangnya, ada beberapa program yang belum tercapai mengenai keberlangsungan program pada penambahan modal usaha (Romi Saputra, 2018). Yang dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan pada aspek lokasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, teori utama yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan juga hasil penelitian.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Handayani, Mu'min Ma'ruf, Gusti Ayu Ambarawa (2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Handayani, Mu'min Ma'ruf, dan Gusti Ayu Ambarawa (2019), yang berjudul "PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT" penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yaitu metode diskriptif kualitatif dan juga teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang dimana untuk mengetahui kondisi kemiskinan serta penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi.

Yang dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan pada aspek lokasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, teori utama yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan juga hasil penelitian.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan fakir

miskin melalui program PMKS pada masa pandemi covid-19 di Kota Batam.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan pemberdayaan dalam mengatasi faktor penghambat pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam.

II. METODE

Bapak dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori pemberdayaan parsons at al sebagai alat analisis dalam penelitian saya. Menurut parsons terdapat 3 dimensi pemberdayaan yang dimana pertama aras mikro, aras mezzo, dan juga aras makro. Dari ketiga dimensi teori parsons ini diturunkan menjadi indikator-indikator yang akan mengukur pemberdayaan masyarakat fakir miskin. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah undang-undang nomor 6 tahun 1974, undang-undang nomor 11 tahun 2009, undang-undang nomor 13 tahun 2011, yang dimanna unfang undang ini mengatur tentang fakir miskin dan juga peraturan walikota batam nomor 45 tahun 2016 tentang tupoksi dinas sosial dan pemberdayaan masyaraakat Kota Batam.

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing verification*. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir *conclusion drawing* yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam.

Hasil Observasi Peneliti dilapangan Peneliti melihat, merekam, dan menulis kejadian yang terjadi di Dinas sosial dan Pemberdayaan terkait dengan pelayanan terhadap Kelompok Fakir Miskin itu sendiri yang dimana masih terdapat kekurangan pelayanan Fakir Miskin sendiri dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayanan di dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan langsung ke daerah pesisir tepatnya di pulau bulang yang dimana masih banyaknya kelompok fakir miskin yang memperoleh penghasilan dengan menjadi nelayan dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para kelompok fakir miskin yang menjadi nelayan ini harus menyesuaikan dengan kondisi arus dan angin untuk berangkat menangkap ikan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat miskin di pesisir belum bisa mencukupi kebutuhan sehari harinya.

Pemberdayaan fakir miskin melalui program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam penanganan fakir miskin sendiri dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mendeskripsikannya sebagai berikut : “ Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin dapat berpartisipasi dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus wilayahnya dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan juga penanganan fakir miskin itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : “Kesejahteraan Sosial merupakan suatu keadaan untuk memenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dibuat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Penanganan fakir miskin sendiri merupakan suatu langkah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakatnya. Salah satu pemberdayaan yang harus didukung adalah pemberdayaan fakir miskin di kota batam itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat melalui penangan fakir miskin maka Pemda melalui Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam melakukan pendekatan kepada kelompok fakir miskin di kota batam agar nantinya masyarakat miskin yang tidak berdaya agar menjadi berdaya sehingga dilakukannya pendekatan mikro, pendekatan mezzo , dan juga pendekatan makro. Hal ini dilakukan dikarenakan masih rendahnya mental masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan kegiatan penelitian yang saya lakukan tentang pemberdayaan fakir miskin di dinas sosial dan pemberdayaan, belum mencapai target yang di inginkan di karenakan berbagai macam hal. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian dengan adanya pemberdayaan bagi masyarakat fakir miskin ini dapat memberi peluang yang bagi mereka dengan diberikannya Bantuan kepada kelompok fakir miskin dan juga dengan adanya program E-Waroeng di kota batam untuk kelompok fakir miskin yang menerima bantuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka apalagi dimasa pandemi seperti saat sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir miskin rabu 12 Januari 2022 yaitu : kelompok masyarakat fakir miskin memiliki *skill* yang terbatas, kurangnya inovasi dan kreatifitas serta pengetahuan mereka sangat sedikit, ditambah dengan pikiran-pikiran *negatif* yang timbul di mereka dan dengan adanya mental miskin sehingga mereka tidak mau untuk keluar dari zona kemiskinan.

Dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber maka dengan minimnya *Soft skill* inovasi dan kreatifitas membuat mereka kelompok fakir miskin tidak mampu untuk memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sehingga banyak masyarakat fakir miskin tidak mampu keluar dari gariws kemiskinan

A. Pendekatan Aras Mikro

Pendekatan mikro dimaksudkan yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 kepada bapak zulkaf hambali, SE selaku kepala bidang penanganan fakir miskin di dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam adalah :

Kita ada kerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling secara rutin biasanya seminggu sekali tetapi karena kondisi sekarang lagi ada *covid-19* maka bimbingan dan konseling biasanya dilakukan dengan sistem *daring*". Dengan dilakukannya bimbingan terhadap kelompok fakir miskin ini diharapkan banyaknya kelompo fakir miskin yang dapat mencairkan bantuan yang diberikan pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok fakir miskin itu sendiri. Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat juga melakukan program penanganan fakir miskin melalui pembimbingan para kelompok PKH. Yang dimana di dalam PKH terdapat pendamping PKH tersebut yang dimana orang tersebut digunakan untuk mempercepat masyarakat fakir miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Dimana program tersebut dilaksanakan secara kelompok yaitu melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dimana dalam pertemuan tersebut merupakan hal wajib untuk diikuti bagi para penerima bansos PKH. Di dalam P2K2 di berikan pembimbingan melalu materi-materi yang disampaikan secara edukatif, dari pengetahuan dasar kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan untuk keluarga, dan sampai kepada pola pengasuhan anak dan pendidikan terhadap kelompok fakir miskin tersebut. Pertemuan itu dilaksanakan setiap sebulan sekali dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak kabid penanganan fakir miskin. Penulis juga melakukan pengamatan dan penelitian ke daerah pesisir di kota batam tepatnya di kelurahan bulang lintang yang dimana akses untuk menuju ke kelurahan tersebut harus menggunakan kapal kayu. Penulis melakukan wawancara di kelurahan bulang lintang untuk turun langsung melihat kondisi dan situasi masyarakat miskin di daerah pesisir yang dimana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak lurah bulang lintang bapak M.Irwan pada tanggal 11 Januari 2022 :

Untuk kegiatan pemberdayaan di kelurahan bulang sendiri yaitu terdapat pemberdayaan untuk kelompok fakir miskin khususnya di daerah pesisir pulau bulang sendiri yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, program pemberdayaan yang dilakukan di pulau bulang sendiri berupa KUBE nelayan yang dimana program tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah bulang lintang.

Maka oleh karena itu Program pemberdayaan yang dilakukan oleh kelurahan bulang lintang adalah pembimbingan teknologi (BIMTEK) kepada masyarakat miskin di pulau bulang untuk meningkatkan kualitas serta mindset dari fakir miskin sendiri yang dimana program pembimbingan yang dilakukan oleh mengundang narasumber ahli di bidangnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin bulang sendiri. Program pembimbingan ini berlangsung selama seminggu yang dimana program pembimbingan yang dilakukan dengan narasumber turun langsung ke pulau bulang untuk memperikan pelatihan dan pembimbingan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar dari pemerintah. Bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam kepada kelompok fakir miskin yaitu melatih dan memberikan arahan-arahan yang harus dilakukan kepada fakir miskin terkait bantuan yang diberikan sehingga bantuan tersebut tidak habis begitu saja namun bisa dimanfaatkan oleh kelompok fakir miskin untuk berjualan sehingga kebutuhan dasar sehari-hari dapat terpenuhi. Setelah melakukan bimbingan pemerintah daerah melakukan konseling kepada kelompok fakir miskin yang tergabung dalam E-Waroeng.

Penyuluhan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (pembimbing) kepada individu yang mengalami suatu masalah yang berpusat pada teratasannya masalah yang dihadapi klien atau individu. Penyuluhan juga harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat fakir miskin ini dengan tujuan mencari tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses E-Waroeng tersebut. Adapun yang telah dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan 3 macam bentuk penyuluhan yang dilakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan informasi penulis dapatkan dari hasil Wawancara Dengan Bapak Kasi Jaminan Sosial Adi Yunus S.E pada tanggal 13 Januari 2022 yaitu :

1. Penyuluhan Jaminan kesehatan dan Bantuan biaya berobat
Penyuluhan yang dilakukan terhadap jaminan kesehatan dan bantuan biaya berobat ditujukan kepada masyarakat miskin yang dimana nantinya bagi masyarakat miskin yang terkena penyakit dan tidak dapat memenuhi biaya berobatnya maka akan diberikan bantuan melalui dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyuluhan dan pendampingan terhadap keluarga PKH
Program keluarga harapan adalah program pengentasan kemiskinan yang dimana program ini bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM)
3. Pertemuan terhadap kelompok fakir miskin
Pertemuan kelompok fakir miskin merupakan kegiatan penyuluhan yang dihadiri oleh pihak BRI kepada kelompok PKH yang membuat kelompok E-Waroeng yang terdiri dari 10 orang PKH. Yang dimana pelayanan PKH tersebut digunakan untuk melayani masyarakat miskin juga sehingga keuntungan dari E-Waroeng tadi dibagi kepada 10 orang anggota kelompok tadi untuk mendapatkan pendapatan.

Pada hasil wawancara di atas bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan pembinaan berupa penyuluhan sehingga dengan kegiatan tersebut dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada Kelompok Fakir Miskin dengan harapan agar mampu mengembangkan pribadi

dan kualitas individunya dengan sehingga dapat mampu keluar dari garis kemiskinan.

B. Pendekatan Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan memakai pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan dinamika kelompok biasanya dipakai sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi.

Dengan pendekatan Pemerintah menciptakan suatu cara yang dapat digunakan bagi masyarakat fakir miskin agar dapat berkelompok dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah yang dihadapi bersama. Dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat memperdalam keterampilan pada setiap masing-masing individu kemudian dapat di diskusikan secara bersama dalam kelompok, meskipun di masa pandemi *covid-19* tetapi ketika ada pertemuan pembinaan tatap muka dengan para kelompok fakir miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam selalu menyediakan fasilitas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini juga dapat mempermudah pemerintah dalam pemberian pembinaan yang berupa pemantapan pengetahuan dan bantuan lainnya.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis di lokasi penelitian bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam membuat berbagai kegiatan guna meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada masyarakat melalui industri eceng gondok diantaranya yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan atau penelitian, pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang lain tetapi juga memungkinkan secara otodidak, oleh sebab itu pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat dikarenakan dengan pendidikan maka akan dapat mengubah mindset para kelompok fakir miskin untuk bisa keluar dari garis kemiskinan.

Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Batam memberikan pengetahuan pendidikan kepada kelompok fakir miskin supaya kelompok masyarakat fakir miskin kedepannya dapat menggunakan bantuan yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya maka pentingnya diberikannya edukasi terhadap kelompok fakir miskin sehingga lebih tepat sasaran dalam menggunakan bantuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Bapak Adi Yunus, ST pada tanggal 12 Januari 2022 yaitu:

Dalam memberikan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap masyarakat fakir miskin, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melakukan kegiatan untuk pelatihan kepada masyarakat fakir miskin dan ada sekitar 125 orang masyarakat kelurahan bulang yang ikut mengikuti pelatihan di daerah batam pada bulan September lalu untuk menggali ide-ide yang ada untuk kemudian di terapkan ke dalam kelompok yang bergabung dalam E-Waroeng di Kota Batam. kegiatan pendidikan tersebut di damping oleh 4 (empat) orang pendamping dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Dalam pelaksanaannya sosialisasi dari Pemda khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dilakukan dengan cara mendatangkan pelatih atau tutor ke daerah pulau bulang sendiri melainkan juga dilaksanakan di kota batam, mengingat kurangnya pengetahuan dan inovasi dengan latar pendidikan yang kurang mendukung pada masyarakat fakir miskin. Pelaksanaan pelatihan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam kini telah

diselenggarakan sebanyak empat kali yang terakhir dilakukan 18 Desember 2021 tentang pelatihan cara pembuatan alat tangkap kepada masyarakat fakir miskin daerah pesisir pulau bulang untuk peningkatan hasil tangkapan ikan di laut. Dan juga pelatihan dalam mengelola E-Waroeng ke pada Kelompok KPH yang menjadi pengelola E-Waroeng tersebut.

2. Pemberian Bantuan

Dalam mendukung pemberdayaan Fakir Miskin ini selain memberikan dukungan berupa memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Fakir miskin yang ikut serta dalam pelatihan tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam merangkul Bank Rakyat Indonesia untuk terus bekerjasama dalam Menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin memberikan dukungan menyalurkan bantuan BPNT dari Kemensos melalui Bank Rakyat Indonesia.

Karena selain pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan juga merupakan masalah yang umum dialami para fakir miskin. Yang dimana banyak masyarakat miskin yang masih belum bisa mencairkan bantuannya dikarenakan tidak sesuainya dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dalam mencairkan bantuan tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah yakni Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam bertujuan untuk memperkuat potensi atas daya yang dimiliki oleh kelompok fakir miskin yang ikut serta dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan, bantuan peralatan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas individu yang mereka perlukan oleh pemerintah.

Sejalan dengan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak M. Irwansyah Selaku Lurah bulang lintang, pada tanggal 13 Januari 2022 di Kantor Kelurahan Mangsang beliau mengatakan bahwa :

Dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat terutama di bidang perekonomian kemarin kami termasuk kelurahan nomor dua yang telah membentuk Forum Kelompok Usaha Bersama Nelayan sehingga mendapatkan bantuan kelompok Nelayan maju yang dimana terdapat bantuan pemerintah seperti alat tangkap, budidaya, serta bibit perikanan untuk dikembangkan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah pesisir. Dan dalam pemberian bantuan sosial di kelurahan bulang harus dilakukan secara berkelompok dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.

Dari data wawancara yang penulis dapatkan dengan bapak lurah bulang lintang bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan di kelurahan bulang lintang adalah melalui pemberdayaan nelayan melalui kelompok usaha bersama seperti alat tangkap dll, yang dimana dengan program pemberdayaan berikut dapat membuat masyarakat fakir miskin di wilayah pesisir untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Pendekatan Makro

Disebut dengan strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena target perubahan diarahkan kepada pengaturan lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat dan pengembangan masyarakat merupakan beberapa strategi pada pendekatan ini.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menerapkan strategi yang akan ditempuh kurang lebih 5 tahun kedepan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

1. Meningkatkan pemberdayaan sosial melalui pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang meliputi TKSK, PKH, Pekerja Sosial, Pendamping Lansia, Pendamping Disabilitas, dan Konsultan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Menngoptimalkan pelayanan/upaya rehabilitasi sosial thdp Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3. Kesiadaan data yang akurat tentang DTKS (Penduduk Miskin)

Adapun Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kemampuan Potensi TKSK dan PKH dalam pendataan dan pendampingan sosial.

2. Optimalisasi rehabilitasi PPKS melalui reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, dan spirual, serta layanan kedaruratan dan rujukan bagi PPKS

3. Pendataan dan pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang Miskin / Pra Sejahtera.

Dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat fakir miskin di butuhkan strategi sistem besar sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan khususnya di kota batam. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin diperlukannya peningkatan pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan potensi TKSK dan PKH dalam pendataan sekaligus pendampingan sosial. Selain itu juga dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam juga membuat pendampingan sekaligus pengembangan kepada kelompok PKH terhadap pengembangan pemberdayaan E-Waroeng yang dilakukan sehingga terdapat peningkatan kemampuan dari kelompok PKH tersebut. harapan kedepannya para kelompok fakir miskin mampu mandiri dalam memajukan Usahanya tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah saja.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Fakir Miskin Kota Batam, Bapak Zulkaf Hambali, SE, MM pada tanggal 12 Januari 2022 yaitu

Harapan Saya, agar kelompok fakir miskin dapat hidup mandiri dan dapat keluar dari garis kemiskinan sehingga kelak kedepannya garis kemiskinan dapat berhenti di keluarga tersebut dan tidak dilanjutkan kepada anak cucunya kedepannya dan harapan saya berikutnya adalah mereka dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak kapala bidang fakir miskin dapat disimpulkan bahwa proses pemberian bantuan yang diberikan diharapkan dapat membuat masyarakat miskin dapat menggunakan dengan sebaik baiknya sehingga mereka dapat berdaya sehingga bisa mandiri.

3.2 Faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam

Pemberdayaan masyarakat fakir miskin dalam pelaksanaannya tentu terdapat penghambat dalam pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS dimasa pandemi virus covid-19 di kota batam. Mengidentifikasi adanya faktor-faktor penghambat adalah salah satu faktor penting dalam pemberdayaan fakir miskin. Berikut adalah yang menjadi penghambat pemberdayaan fakir miskin di kota batam :

1. Tingginya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota batam, dimana hal tersebut dikarenakan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial yang sering dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor Ekonomi, budaya, politik, etnis, agama, penyimpangan perilaku, hukum, industrialisasi dan urbanisasi). Adapun verifikasi data masyarakat miskin atau DTKS yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat 373.643 jiwa yang dimana sebelumnya pada tahun 2019 terdapat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 55,669 KPM yang artinya terdapat peningkatan dari jumlah data yang dilakukan validasi. Hal ini yang kemudian hari akan menjadi acuan atau pedoman sebagai data basis kemiskinan di kota batam yang dimana dapat

mempermudah penentuan program pengentasan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bidang fakir miskin.

2. Masih kurang optimalnya peran aktif dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam mengatasi permasalahan dari kesejahteraan sosial sehingga bisa memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan dengan baik.

3. Masih belum seimbang antara populasi PMKS dengan keterbatasannya dana, hal ini menyebabkan upaya mengatasi tidak dilakukan dengan serentak, sementara itu keberadaan PMKS yang sangat tinggi belum bisa bersinergi dengan daerah lainnya.

4. Rendahnya Sumber daya manusia dari segi pengetahuan mengenai masalah kesejahteraan sosial yang dimiliki baik di kalangan legislatif, aparat pemerintah maupun di kalangan yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial.

5. Tidak tercapainya program APBD II dikarenakan adanya beberapa kegiatan atau penanganan jika ada kejadian terlebih dahulu contoh : adanya bencana alam maupun sosial, sementara untuk program Nasional lewat program PKH, dan BPNT di Batam cukup berjalan lancar namun kendala dilapangan dapat dikoordinasikan dengan lintas dinas sebagai pelaksana program tersebut.

6. Masih terdapatnya mentalitas sebagian masyarakat yang menganggap bahwa semua warga negara berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga masih dibutuhkannya bimbingan terhadap masyarakat agar dapat memahami.

7. Terbatasnya yang menerima bantuan dikarenakan menetapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga waktu pendistribusian bantuan memakan waktu yang cukup lama.

3.3 Upaya Dinas Sosial Dan Pemberdayaan dalam mengatasi faktor penghambat fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam?

A. Peningkatan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat miskin

Dengan melakukan peningkatan pelayanan sosial terhadap kelompok fakir miskin di kota Batam yang dilakukan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota Batam yaitu dengan memperhatikan dengan meningkatkan pelayanan yang diberikan bagi para penyandang masalah kesejahteraan masyarakat (PMKS) dan pemberdayaan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sehingga nantinya dengan diperhatikannya mutu pelayanan terhadap kelompok fakir miskin tersebut dapat memudahkan segala hal urusan yang berkaitan dengan pencairan dan pendistribusian bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Peningkatan mutu pelayanan sosial yang diberikan juga bisa dilakukan dengan mempercepat pelayanan terhadap pencairan bagi masyarakat miskin yang memiliki kartu penerima manfaat (KPM).

Dalam pendataan bagi masyarakat miskin juga perlu diperhatikan sehingga permasalahan bantuan yang tidak diterima oleh para penerima bantuan tidak menjadi permasalahan lagi bagi para penerima bantuan. Yang dimana masih kurangnya pengetahuan masyarakat miskin dalam melakukan pendataan yang dilakukan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga nantinya dalam proses penerimaan bantuan tidak terjadinya keterlambatan dalam proses pencairan dana. Hal inilah yang menjadi tugas dari dinas sosial dan pemberdayaan dalam meningkatkan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat fakir miskin di kota Batam.

B. Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial

Sesuai analisis penulis, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah melakukan penyusunan program pembinaan dan bimbingan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi para kelompok fakir miskin. Menurut wawancara dengan sekretaris Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Batam Bapak Leo Putra, S.STP adalah :

Dalam menyusun strategi Dinsos menggunakan sistem *bottom up*. Dinsos menampung aspirasi dari masyarakat kemudian membuat perencanaan dan selanjutnya Pemerintah daerah yang akan menyetujui saat rapat karena terkait dengan anggaran. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam menyusun strategi kebijakan menggunakan sistem *bottom up*. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh dinsos yaitu pegawai dari Dinas sosial dan mendatangi secara langsung ke rumah dan/atau ke tempat kelompok fakir miskin untuk menanyakan kendala atau masalah yang sedang dihadapi oleh para kelompok fakir miskin, selain itu juga Dinas sosial juga memberikan rehabilitasi sosial terhadap kelompok PMKS dengan bekerjasama dengan UPT Nilam Suri. Untuk diberikan penyuluhan terhadap masalah yang mereka hadapi serta dinas sosial juga melakukan untuk menghadiri rapat koordinasi untuk membahas masalah yang dihadapi kemudian mencari solusi. Hasil dari diskusi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam memberdayakan kelompok fakir miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, penyusunan strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menggunakan sistem *bottom up* atau dari bawah ke atas, yang berarti penyusunan strategi berdasarkan aspirasi dari masyarakat kemudian atasan menampungnya. Aspirasi yang ditampung tadi selanjutnya dijadikan sebagai rencana strategis.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah melaksanakan program pembinaan terhadap kelompok PMKS di Kota Batam. Sebagaimana terkait dengan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan kegiatan peningkatan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan pada bulan september lalu di Kota Batam, optimalisasi pemanfaatan bantuan sosial yang dilakukan pada tahun 2021, pelatihan pengembangan kualitas kelompok fakir miskin di kota batam, optimalisasi dalam pemberian pembinaan dan pelatihan kepada kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota batam serta adanya kegiatan pendukung yang dilakukan oleh Dinsos seperti rapat koordinasi dan kegiatan pendukung lainnya.

Berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam sudah optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada pemberdayaan kelompok fakir miskin nyatanya semakin bisa berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinsos harus lebih ditingkatkan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat meningkatkan kualitas individu yang nantinya bisa keluar dari garis kemiskinan dan dapat mendongkrak perekonomian serta menurunkan angka kemiskinan di Kota Batam.

C. Peningkatan Kesejahteraan Sosial terpadu melalui Puskesmas SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat harus menjadi agenda prioritas dinas sosial yang dimana dinas sosial menjalankan program pemerintah khususnya bagi masyarakat

miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Hal ini termasuk kedalam Pembukaan UUD 1945. Namun penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah sosial belum maksimal dikarenakan kurang terpadunya penyelenggaraan layanan sosial untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah membuat program SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial.

Penyelenggaran Puskesmas SLRT merupakan amanat yang terkandung dalam UU no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kemudian aturan tersebut diturunkan lagi kedalam Permensos nomor 15 tahun 2018 untuk penangan fakir miskin dan orang tidak mampu. Dalam menangani masalah sosial yang dihadapi PPKS. Puskesmas SLRT membuat bermacam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya penyediaan data dalam penanganan PPKS, penyediaan sumber informasi program pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, penanganan keluhan yang dialami masyarakat, pemberian rujukan terhadap orang tidak mampu, dan penjangkauan terhadap orang miskin. Masyarakat bisa memberikan pertanyaan, berbagai keluhan, atau pengaduan kepada SLRT baik lewat fasilitator maupun *front office* Puskesmas SLRT. Namun SDM SLRT juga membuat penjangkauan ke masyarakat untuk memastikan masyarakat bisa memiliki hak-haknya atau menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Setelah keluhan dan pengaduan masyarakat masuk, kemudian akan dicek kepesertaan warga yang melapor tersebut. Jika masyarakat yang melapor masuk ke dalam DTKS maka laporan tersebut akan di lakukan penindakan sesuai dengan prosedur. Namun jika warga yang melapor tidak masuk ke dalam DTKS, maka terlebih dahulu akan mengecek berupaya memberikan alternatif lain.

Untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat maka para pegawai SLRT harus memahami setiap program-program kesejahteraan sosial yang ada di pusat maupun daerah supaya nantinya dapat memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Program yang dikelola oleh pemerintah pusat terdiri dari Program kesehatan misalnya terdiri dari program rehabilitasi sosial dan Program Indonesia Sehat. Kemudian program sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan lain-lain. Program pendidikan terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Pintar Keagamaan, dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin. Sementara program ekonomi terdiri dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE), subsidi listrik, subsidi gas LPG, subsidi pupuk, dan lain-lain.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian (Penting wajib ada sub bab ini: berisi perbandingan antara temuan penelitian anda dengan temuan penelitian sebelumnya)

Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam, yg kedua Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam, yang ketiga Bagaimana Strategi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melaului program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam, yg kedua Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan

pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam, yang ketiga Bagaimana Strategi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui program PMKS pada masa pandemi virus covid-19 di Kota Batam.

IV. KESIMPULAN

Dari paparan hasil beserta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan fakir miskin melalui program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) telah dilaksanakan namun belum memperoleh hasil optimal dikarenakan terdapatnya pandemi virus covid-19 yang membuat angka kemiskinan bertambah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kesejahteraan sosial ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber bacaan berupa Buku :

Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial* (1st ed.). Kota Depok: RajaGrafindo Persada.

Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. (T.S. Razak,Ed.). Makassar: De La Macca.

Henslin, J. M. (2007). *Essentials Of Sociology*. (terjemahan). (Erlangga,Ed.). Jakarta.

Mardikanto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Midgley, J. (1995). *Social Development; the Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd.

Solihin, I. (2012). *manajemen strategik*. (A. Maulana,Ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sujarweni, v. W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

b. Sumber berupa Jurnal :

Apriyadi, A., Syaukat, Y., & Nasdian, F. T. (2013). Strategi dan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama di kabupaten bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 48–61.

Bahri, S. (2015). Strategi komunikasi dinas kesejahteraan sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) di kota samarinda. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 228–243.

Budio, S. (2019). Strategi manajemen sekolah. *Jurnal Menata*, 2(2), 56–72.

Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2), 157–164.

nur handayani, mu'min ma'ruf, gusti ayu ambarawati. (2019). Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial. *J-3P(Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 4, 1–12.

Pranasari, D. (2012). Strategi pengentasan penyandang kesejahteraan sosial (pmks) khususnya penyandang cacat di wilayah kabupaten kediri. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1, 95–108.

Romi Saputra. (2018). Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2, 111–129.

Suradi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial (Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat). *Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(03), 1–11.

c. Sumber dari website dan lain-lain :

BPS Kota Batam. (2020). Data Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Retrieved from <https://batamkota.bps.go.id/subject/26/indeks Pembangunan manusia.html>

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. (2021). Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota batam. Retrieved from <https://dinsospm.batam.go.id/wp-content/uploads/sites/29/2019/05/RENSTRA-PERUB2019-Ctk..pdf>

